



Integrasi Manajemen dan Pengetahuan Kewarganegaraan dalam Penguatan Sistem Manajemen Pertahanan Negara

Arman Maulana¹, Siti Rosmayati²

^{1,2} Politeknik Piksi Ganesha

E-mail: ¹armandjexo@gmail.com, ²siti.rosmayati91@gmail.com

ABSTRAK

Tantangan pertahanan negara yang tidak hanya berasal dari ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter seperti disinformasi, radikalisme, serangan siber, dan konflik sosial yang memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Pengetahuan kewarganegaraan menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran bela negara dan partisipasi warga negara dalam mendukung sistem pertahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dalam penguatan sistem manajemen pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan konsep manajemen, pengetahuan kewarganegaraan, serta manajemen pertahanan negara. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengetahuan kewarganegaraan mampu memperkuat sistem manajemen pertahanan negara melalui peningkatan kesadaran bela negara, partisipasi masyarakat, dan penguatan ketahanan nasional. Pengetahuan kewarganegaraan berperan sebagai modal sosial yang mendukung terbentuknya warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, integrasi tersebut menghasilkan pendekatan pertahanan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensional. Dengan demikian, penguatan sistem manajemen pertahanan negara memerlukan sinergi antara tata kelola organisasi yang efektif dan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan masyarakat sebagai bagian dari implementasi Sistem Pertahanan Semesta di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen; Pengetahuan Kewarganegaraan; Manajemen Pertahanan; Bela Negara; Sistem Pertahanan Semesta; Ketahanan Nasional.

ABSTRACT

National defense challenges stem not only from military threats but also from non-military threats such as disinformation, radicalism, cyberattacks, and social conflicts, requiring the involvement of all components of the nation. Civic knowledge is a crucial factor in building national defense awareness and citizen participation in supporting the national defense system. This study aims to analyze the integration of management and civic knowledge in strengthening the national defense management system. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through literature studies, document analysis, and various scientific sources relevant to the concepts of management, civic knowledge, and national defense management. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña model, which includes data condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results show that the integration of management functions including planning, organizing, implementing, and monitoring with civic knowledge can strengthen the national defense management system by increasing national defense awareness, community participation, and strengthening national resilience. Civic knowledge acts as social capital that supports the formation of citizens who have responsibility for national security and sovereignty. Furthermore, this integration results in a more inclusive, participatory, and adaptive defense approach in facing various multidimensional threats. Thus, strengthening the national defense management system requires synergy between effective organizational governance and increased civic knowledge among the public as part of the implementation of the Universal Defense System in Indonesia.

Keywords: Management; Civic Knowledge; Defense Management; National Defense; Universal Defense System; National Resilience.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global pada abad ke-21 telah mengubah paradigma pertahanan negara dari yang semula berorientasi pada ancaman militer konvensional menjadi lebih kompleks dan multidimensional. Ancaman yang dihadapi suatu negara saat ini tidak hanya berupa agresi militer, tetapi juga mencakup ancaman nonmiliter seperti serangan siber, disinformasi, radikalisme, konflik sosial, serta berbagai bentuk gangguan terhadap stabilitas nasional. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pertahanan yang adaptif dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dalam konteks Indonesia, konsep Sistem Pertahanan Semesta menempatkan warga negara sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen pertahanan tidak hanya bergantung pada kemampuan institusi pertahanan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki kesadaran kebangsaan dan pemahaman kewarganegaraan yang baik. Kajian terbaru menunjukkan bahwa transformasi pertahanan modern memerlukan sinergi antara pengetahuan sipil dan militer untuk membangun ketahanan nasional yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman hibrida dan multidimensional (Muhammad Kemalsyah, 2025).

Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sumber daya pertahanan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perspektif pertahanan negara, manajemen tidak hanya berfungsi mengatur sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, tetapi juga mengintegrasikan berbagai potensi nasional yang dapat mendukung upaya pertahanan. Efektivitas sistem manajemen pertahanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengkoordinasikan seluruh komponen pertahanan, termasuk masyarakat sipil. Oleh sebab itu, pendekatan manajemen modern perlu dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan aspek sosial, pendidikan, dan kewarganegaraan. Pengelolaan pertahanan yang hanya berfokus pada aspek militer berpotensi menghasilkan kesenjangan antara kebijakan pertahanan dengan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, manajemen pertahanan yang mengintegrasikan unsur kewarganegaraan mampu menciptakan sistem pertahanan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan nasional (Pusparini & Suryaningrum, 2025).

Salah satu faktor yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem pertahanan negara adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, identitas nasional, konstitusi, serta tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Pengetahuan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran bela negara dan partisipasi aktif warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan *civic knowledge* melalui pendidikan kewarganegaraan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan komitmen kebangsaan warga negara (Belladonna & Anggraena, 2019). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran bela negara sebagai bagian dari implementasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Dengan demikian, *civic knowledge* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik, tetapi juga sebagai modal sosial yang mendukung penguatan sistem pertahanan negara.

Meskipun pentingnya manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dalam sistem pertahanan telah banyak dibahas secara terpisah, kajian mengenai integrasi kedua aspek tersebut dalam kerangka manajemen pertahanan negara masih relatif terbatas. Padahal, tantangan pertahanan kontemporer menuntut adanya pendekatan yang mampu menghubungkan pengelolaan sumber daya pertahanan dengan penguatan kapasitas kewarganegaraan masyarakat. Integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan diyakini dapat menghasilkan model penguatan sistem pertahanan yang tidak hanya efektif secara organisatoris, tetapi juga memperoleh dukungan sosial yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Integrasi Manajemen dan Pengetahuan Kewarganegaraan dalam Penguatan Sistem Manajemen Pertahanan Negara” menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana kedua aspek tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membangun sistem pertahanan negara yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada partisipasi seluruh warga negara dalam kerangka Sistem Pertahanan Semesta Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan berperan dalam penguatan sistem manajemen pertahanan negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam konteks pertahanan dan kewarganegaraan. Menurut John W. Creswell dan Cheryl N. Poth (2018), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan melalui pengumpulan data pada lingkungan alamiah, analisis data secara induktif dan deduktif, serta interpretasi yang menekankan perspektif partisipan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan telaah literatur yang berkaitan dengan manajemen, kewarganegaraan, dan pertahanan negara. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian, seperti akademisi, praktisi pertahanan, dosen pendidikan kewarganegaraan, maupun pihak yang terlibat dalam program bela negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dalam mendukung penguatan sistem manajemen pertahanan negara. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pengecekan ulang informasi kepada informan guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

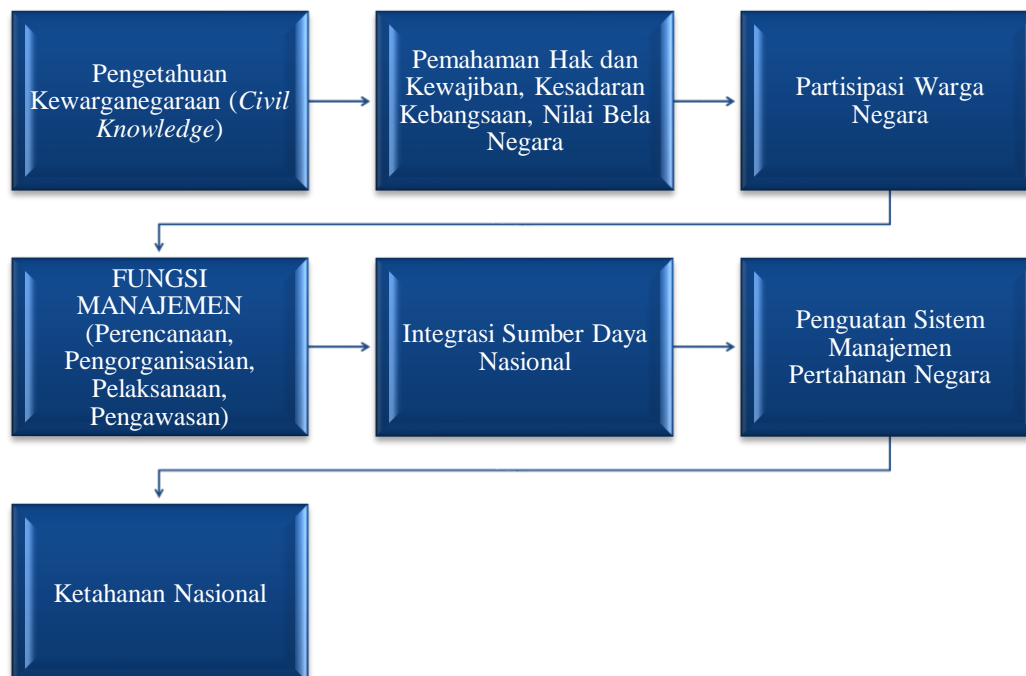
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penguatan sistem manajemen pertahanan negara. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diterapkan dalam berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran bela negara. Namun, implementasi fungsi manajemen tersebut masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan kelembagaan, sementara aspek penguatan kapasitas kewarganegaraan masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Informan penelitian menilai bahwa keberhasilan sistem pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusi pertahanan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, pengelolaan pertahanan yang efektif memerlukan sinergi antara pendekatan manajerial dan pengembangan pengetahuan kewarganegaraan agar mampu menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam mendukung kepentingan pertahanan nasional.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran bela negara yang menjadi salah satu unsur penting dalam sistem pertahanan semesta. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara cenderung memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Pengetahuan tersebut tidak hanya meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga mendorong munculnya sikap partisipatif dalam berbagai kegiatan sosial dan kebangsaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan melalui jalur formal maupun nonformal memiliki pengaruh terhadap terbentuknya karakter warga negara yang sadar akan perannya dalam menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, pengetahuan kewarganegaraan dapat dipandang sebagai modal sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.

Penelitian menemukan bahwa integrasi antara fungsi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dapat diwujudkan melalui perencanaan program bela negara yang berbasis kebutuhan masyarakat, pengorganisasian sumber daya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pelaksanaan kegiatan edukatif yang berorientasi pada penguatan kesadaran kebangsaan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program. Dalam tahap perencanaan, unsur pengetahuan kewarganegaraan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan strategi pembinaan masyarakat. Pada tahap pengorganisasian, kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, materi kewarganegaraan dan bela negara disampaikan melalui berbagai metode yang adaptif sesuai karakteristik kelompok sasaran. Adapun pada tahap pengawasan, evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman, perubahan sikap, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pertahanan negara. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam upaya memperkuat sistem pertahanan nasional.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penguatan sistem manajemen pertahanan negara akan lebih efektif apabila didukung oleh peningkatan pengetahuan kewarganegaraan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem pertahanan yang hanya mengandalkan kekuatan institusional tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menghadapi berbagai keterbatasan dalam merespons ancaman yang semakin kompleks. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki pemahaman kewarganegaraan yang baik dan diintegrasikan ke dalam proses manajemen pertahanan, akan terbentuk hubungan yang lebih kuat antara negara dan warga negara dalam menjaga keamanan nasional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem pertahanan semesta tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh kualitas kesadaran dan partisipasi warga negara yang dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengelolaan yang terencana. Oleh karena itu, integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu strategi yang relevan dalam mewujudkan sistem manajemen pertahanan negara yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pertahanan pada era modern.



Gambar 1. Model Analisis Integrasi Manajemen dan Pengetahuan Kewarganegaraan dalam Sistem Pertahanan Negara

Gambar 1 menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) memiliki peran fundamental sebagai landasan dalam membentuk kesadaran bela negara pada setiap warga negara. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai

Pancasila, konstitusi, nasionalisme, serta tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek kewarganegaraan akan mendorong munculnya kesadaran individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai upaya yang mendukung kepentingan nasional, termasuk dalam bidang pertahanan negara. Kesadaran bela negara yang terbentuk kemudian berkembang menjadi partisipasi nyata masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, mendukung kebijakan pertahanan, serta berkontribusi dalam menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter. Partisipasi masyarakat tersebut selanjutnya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya pengelolaan yang terstruktur melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut, berbagai potensi masyarakat dapat diarahkan, dikoordinasikan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung tujuan pertahanan negara. Dengan demikian, integrasi antara pengetahuan kewarganegaraan dan fungsi manajemen menghasilkan suatu mekanisme yang mampu memperkuat sistem manajemen pertahanan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi warga negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional dalam kerangka Sistem Pertahanan Semesta. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan teknologi pertahanan, tetapi juga ditentukan oleh tingkat kesadaran kewarganegaraan masyarakat yang dikelola secara sistematis melalui pendekatan manajemen yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan merupakan pendekatan yang relevan dalam memperkuat sistem manajemen pertahanan negara di era ancaman multidimensional. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kemalsyah (2025) yang menyatakan bahwa transformasi pertahanan Indonesia memerlukan sinergi antara pengetahuan sipil dan pengetahuan militer untuk membangun ketahanan nasional yang adaptif terhadap ancaman hibrida dan kognitif. Fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya nasional ke dalam sistem pertahanan negara. Selain itu, Sabu M. Thampi (2008) menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis dalam mengelola, menyebarkan, dan memanfaatkan pengetahuan guna meningkatkan efektivitas organisasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan dapat diposisikan sebagai aset strategis yang perlu dikelola secara terstruktur dalam sistem pertahanan negara. Dengan demikian, keberhasilan manajemen pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sumber daya militer, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola dan memberdayakan pengetahuan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan nasional.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa pengetahuan kewarganegaraan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan kesadaran bela negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Sari et al. (2022) yang menegaskan bahwa pemahaman konsep bela negara berperan dalam membangun generasi yang memiliki rasa cinta tanah air, tanggung jawab kebangsaan, dan kesiapan menghadapi berbagai ancaman terhadap negara. Deksono et al. (2023) menjelaskan bahwa pendidikan dan pembinaan bela negara mampu menanamkan sikap nasionalisme serta meningkatkan kesadaran warga negara terhadap pentingnya menjaga kedaulatan negara. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa *civic knowledge* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter warga negara yang mendukung sistem pertahanan semesta. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengetahuan kewarganegaraan yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar pula peluang terbentuknya partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dapat diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Temuan ini didukung oleh pandangan Loet Leydesdorff (2012) yang menjelaskan bahwa pengelolaan pengetahuan dalam suatu sistem memerlukan interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor sosial untuk menghasilkan inovasi dan keberlanjutan sistem. Dalam konteks pertahanan negara, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan warga negara menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan nasional. Selain itu, Dewi Okta Pusparini dan Madya Sari Suryaningrum (2025) menegaskan bahwa ancaman nonmiliter seperti disinformasi, serangan siber, krisis sosial, dan pandemi memerlukan pendekatan tata kelola yang dinamis serta melibatkan seluruh komponen bangsa.

Adrian et al. (2024) menekankan bahwa konsep bela negara perlu direkonstruksi melalui pendekatan berbasis kewarganegaraan yang lebih empiris dan partisipatif agar tidak hanya menjadi slogan normatif semata. Oleh karena itu, integrasi fungsi manajemen dengan penguatan pengetahuan kewarganegaraan menjadi salah satu strategi yang dapat menjawab kebutuhan sistem pertahanan modern yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa penguatan sistem manajemen pertahanan negara memerlukan keterpaduan antara tata kelola organisasi dan pengembangan kapasitas kewarganegaraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Aris et al. (2022) yang menyatakan bahwa kemampuan bela negara harus dibangun melalui pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai pertahanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Inggisa Cendra Prakesti (2022) menjelaskan bahwa nasionalisme dan karakter kebangsaan merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pertahanan yang kuat tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik dan teknologi pertahanan, tetapi juga pada kualitas warga negara yang memiliki kesadaran kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan pada akhirnya dapat menjadi model penguatan sistem pertahanan yang selaras dengan konsep Sistem Pertahanan Semesta Indonesia, karena mampu menghubungkan kapasitas institusional negara dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2. Sintesis Hasil Penelitian Integrasi Manajemen dan Pengetahuan Kewarganegaraan terhadap Penguatan Pertahanan Negara

Gambar 2 merupakan sintesis hasil penelitian yang menggambarkan hubungan yang saling terintegrasi antara fungsi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dalam mendukung penguatan sistem pertahanan negara. Model tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensional, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter seperti disinformasi, radikalisme, serangan siber, konflik sosial, dan ancaman hibrida lainnya, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan institusional negara, tetapi juga melibatkan kapasitas dan kesadaran warga negara. Pengetahuan kewarganegaraan berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, nilai-nilai kebangsaan, serta pentingnya bela negara, yang kemudian berkembang menjadi kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap keamanan nasional. Di sisi lain, fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola, mengarahkan, serta mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki bangsa. Integrasi kedua aspek tersebut menghasilkan peningkatan kesadaran bela negara yang

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pertahanan nasional. Partisipasi tersebut selanjutnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pertahanan, dan warga negara sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem pertahanan. Sinergi yang terbangun melalui kolaborasi tersebut memungkinkan terciptanya tata kelola pertahanan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Pada akhirnya, integrasi fungsi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan tidak hanya memperkuat sistem manajemen pertahanan negara, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta yang tangguh, berkelanjutan, serta mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam penguatan sistem manajemen pertahanan negara. Fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan mampu menjadi instrumen strategis dalam mengelola berbagai sumber daya pertahanan secara efektif, sedangkan pengetahuan kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk kesadaran bela negara, rasa tanggung jawab kebangsaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pertahanan tidak hanya bergantung pada kapasitas institusi pertahanan dan kekuatan militer, tetapi juga memerlukan dukungan warga negara yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, integrasi antara manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan sistem pertahanan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sistem Pertahanan Semesta di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah, institusi pendidikan, serta lembaga yang terkait dengan bidang pertahanan meningkatkan sinergi dalam mengembangkan program pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan nilai-nilai bela negara dan manajemen pertahanan. Penguatan pengetahuan kewarganegaraan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal, nonformal, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan agar tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman nasional. Selain itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan program yang mampu menghubungkan fungsi manajemen pertahanan dengan partisipasi masyarakat secara lebih sistematis sehingga seluruh komponen bangsa dapat berkontribusi dalam mendukung ketahanan nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model implementasi integrasi manajemen dan pengetahuan kewarganegaraan pada berbagai tingkat kelembagaan atau wilayah tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapannya dalam sistem pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Abdullah A., Andriyaldi, & Adrian, Hanief. (2024). *Reconstructing the Concept of Bela Negara: From Excessive Jargon to an Empirical Civic-based Approach*. Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2024.2.85>
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). *Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 3(2). DOI: 10.31571/pkn.v3i2.1442.

- Creswell, John W., & Poth, Cheryl N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Gunadi, Gathut Imam, Dwiwicaksoputro, Waskito, & Deksino, George Royke. (2023). *Peran Kegiatan Unhan Mengajar dalam Menanamkan Sikap Bela Negara pada Siswa-Siswi SMAN 67 Jakarta*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.4656>
- Kemalsyah, M. (2025). *Bela Negara and Epistemic Pluralism: Negotiating Civilian and Military Knowledge in Indonesia's Defence Transformation*. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 10(2). DOI: 10.15575/jaqfi.v10i2.52389.
- Kemalsyah, Muhammad. (2025). *Bela Negara and Epistemic Pluralism: Negotiating Civilian and Military Knowledge in Indonesia's Defence Transformation*. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v10i2.52389>
- Khasanah, Isrofiah Laela, Kurnia, Heri, Lestari, Dian, & Sari, Tri Yunita. (2022). *Memahami Konsep Bela Negara dan Pentingnya Diseminasi kepada Generasi Muda*. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i1.1839>
- Leydesdorff, Loet. (2012). *The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model*. *Journal of Knowledge Economy Studies*. Available at: <https://arxiv.org/abs/1201.4553>
- Manurung, Yanto S., Saragih, Herlina, & Sarjito, Aris. (2022). *Martabat Bangsa dan Negara di Atas Segala-Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara*. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20511>
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pusparini, D. O., & Suryaningrum, M. S. (2025). *Rekonstruksi Konsep Bela Negara Dalam Ancaman Non-Militer: Perspektif Dynamic Governance*. *Jurnal Teknik Sipil Pertahanan*, 13(1). DOI: 10.63824/jptsp.v13i1.418.
- Pusparini, Dewi Okta, & Suryaningrum, Madya Sari. (2025). *Rekonstruksi Konsep Bela Negara dalam Ancaman Non-Militer: Perspektif Dynamic Governance*. *Jurnal Teknik Sipil Pertahanan*, 13(1). DOI: <https://doi.org/10.63824/jptsp.v13i1.418>
- Thampi, Sabu M. (2008). *An Introduction to Knowledge Management*. Available at: <https://arxiv.org/abs/0812.0438>